

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pengangguran

2.1.1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacah dan berusaha memperoleh pekerjaan. Sedangkan orang yang bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan paling sedikit dua hari dalam seminggu sebelum hari pencacahan dinyatakan sebagai bekerja (Sumarsono 2003, h. 4).

Menurut Sukirno (2007 h. 69) pengangguran dibedakan dalam dua pengertian pengangguran terselubung atau tersembunyi dan pengangguran musiman. Pengangguran terselubung atau tersembunyi biasanya diartikan sebagai golongan tenaga kerja yang produktivitas marjinalnya adalah nol atau sangat rendah, sehingga walaupun mereka berkerja, usaha tersebut tidak akan menaikkan tingkat produksi. Sedangkan pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu, yaitu pada bulan – bulan dimana kegiatan pertanian atau kegiatan produksi lainnya lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan masa-masa lainnya (Sukirno 2007 h. 69).

Menurut Tambunan (2005, h. 124) pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.

2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek. Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

2.1.2. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno, (2006 h. 328-331) jenis-jenis pengangguran dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan cirinya.

1. Berdasarkan Penyebabnya

a. Pengangguran Friksional, adalah pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3 persen maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh.

- b. Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.
- c. Pengangguran Struktural, adalah pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.
- d. Pengangguran Teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

2. Berdasarkan Cirinya

- a. Pengangguran musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya.
- b. Pengangguran terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja.
- c. Pengangguran tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.
- d. Setengah menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari) disebut *underemployment*.

2.1.3. Masalah Pengangguran

Masalah pengangguran dinegara berkembang adalah banyak faktor- faktor yang menyebabkannya, seperti sempitnya lapangan kerja, tidak ada kemampuan

berkerja, dan tidak ada yang mau untuk meinvestasikan modal di daerah yang kurang berkembang.

Menurut Sukirno (2007, h. 68) pembangunan ekonomi dinegara berkembang pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang semakin rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah, keadaan di negara berkembang dalam beberapa desawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok (Sukirno 2008, h. 23) yaitu:

1. Pengangguran terbuka yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja.
2. Pengangguran tersembunyi yaitu terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari

yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

3. Pengangguran bermusim terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan, yang disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Setengah menganggur (*underemployed*) terjadi bila tenaga kerja tidak bekerja secara optimum (kurang dari 35 jam seminggu atau bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dimana produktivitasnya/ pendapatannya rendah.

Mankiw (2006, h. 44) menyatakan bahwa pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi.

2.2. Inflasi

2.2.1. Pengertian Inflasi

Menurut Rahardja dan Manurung (2004, h.155) mendefinisikan inflasi adalah kenaikan harga barang barang yang bersifat umum dan terus menerus sehingga nilai mata uang menjadi turun.

Menurut Amelia (2007, h. 143) inflasi adalah ciri yang pada umumnya didasarkan dan ditandai dengan adanya suasana harga barang yang tinggi secara mayoritas, dimana seolah-olah kita kehilangan keseimbangan antara daya beli dibandingkan dengan pendapatan sampai pada periode tertentu biasanya dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

Seperti penyakit, inflasi berasal dari banyak sebab. Kenaikkan harga yang bisa diramalkan dapat memberikan angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang rendah dapat mendorong serta memanaskan kegiatan ekonomi sehingga dapat menambah produktivitas atau output nyata, inflasi melambung dapat menyebabkan kerugian yang serius pada produktivitas dan kepada individu melalui redistribusi pendapatan dan kekayaan (Samuelson & Nordhaus 2004, h.390)

Ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi sangat lambat berlakunya, di pandang dari segi pertumbuhan ekonomi. Kenaikkan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja. Tetapi jika inflasi lebih serius keadaannya perekonomian tidak akan berkembang seperti yang diinginkan. Pengalaman beberapa negara yang pernah mengalami hiperinflasi menunjukkan bahwa inflasi yang buruk akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, dan tidak mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno 2006, h. 333).

Sedangkan menurut Rosyidi (2009 h. 131) juga menjelaskan bahwa inflasi merupakan gejala kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus. Kenaikkan harga yang berlangsung sekali atau dua kali saja, lalu reda kembali bukan inflasi namanya. Jika kenaikan itu terjadi secara terus-menerus, maka itulah yang disebut inflasi atau terjadi kenaikan harga itu berlangsung terus selama setahun. Jadi berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi dimana proses kenaikan harga-harga secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama.

Dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa berdasarkan kearahannya antara lain :

a. Inflasi ringan (kurang dari 10 persen per tahun)

Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum terlalu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ini dapat dikendalikan karena harga-harga naik secara umum, tetapi belum mengakibatkan krisis di bidang ekonomi. Inflasi ringan nilainya di bawah 10 persen per tahun.

b. Inflasi sedang (antara 10 persen sampai 30 persen per tahun)

Inflasi sedang belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai penghasilan yang tetap, inflasi sedang berkisar antara 10 persen-30 persen per tahun

c. Inflasi berat (antara 30 persen sampai 100 persen per tahun)

Inflasi berat, inflasi sudah mengacaukan perekonomian pada kondisi inflasi berat ini orang cenderung menyimpan barang. Orang tidak mau untung menabung karena bunga bank lebih rendah dari laju tingkat inflsi. Inflasi berat berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun.

d. Inflasi sangat berat atau Hiperinflasi (lebih dari 100 persen per tahun)

Inflasi sangat berat atau Hiperinflasi. Inflasi jenis ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan susah dikendalikan walaupun dengan tindakan moneter dan tindakan fiskal. Inflasi sangat berat ini nilainya di atas 100 persen per tahun (Sukirno 2006, h. 337).

2.2.2. Efek Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan: *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi, dan produksi nasional masing-masing disebut dengan *fficiencye* dan *output effects*.

a. Efek terhadap pendapatan (*equity Effect*)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan dengan adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Contoh lain, yang dirugikan karena adanya inflasi adalah orang/pihak yang memberikan pinjaman uang dengan bunga lebih rendah dari laju inflasi. Misalnya, dia memberi pinjaman Rp 10.000,00 dengan bunga 10 persen per tahun. Apabila laju inflasi sebesar 15 persen per tahun, maka sebenarnya nilai riil pinjamannya akan menjadi lebih rendah. Sebaiknya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan prosentasi yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase lebih besar dari laju inflasi.

b. Efek terhadap efisiensi (*efficiency effects*)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan merubah pola alokasi faktor produksi itu lebih efisien dalam keadaan tidak ada inflasi. Namun,

kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.

c. Efek terhadap output (*output effects*)

Intensitas efek inflasi berbeda-beda, tergantung apakah inflasi dibarengi dengan kenaikan produksi dan *employment* atau tidak. Apabila produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengerem laju inflasi. Tetapi, apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (*full-employment*) intensitas efek inflasi makin besar. Inflasi dalam keadaan kesempatan kerja penuh ini sering disebut dengan inflasi murni (*pure inflation*) (Nopirin 2011 h.32).

2.2.3. Dampak dan Cara Mengatasi Inflasi

Inflasi yang terjadi didalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat sebagai berikut:

- a. Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, dan inilah yang disebut efek redistribusi dari inflasi (*redistribusi effect of inflation*). Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab retribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh. Namun parah atau setidaknya dampak inflasi terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut adalah sangat tergantung pada apakah inflasi tersebut dapat diantisipasi (*anticipated*) ataukah tidak dapat diantisipasi (*unanticipated*). Inflasi yang tidak dapat diantisipasi sudah tentu akan mempunyai dampak atau akibat yang jauh lebih

serius terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan, dibandingkan dengan inflasi yang dapat diantisipasi.

- b. Inflasi juga dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Hal ini dapat terjadi karena inflasi mengalihkan sumberdaya dari investasi yang produktif (*prudent investment*) ke investasi yang tidak produktif (*unproductive investment*) sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif. Ini yang disebut "*efficiency effect of inflation*".
- c. Inflasi juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja (*employment*), dengan cara yang lebih langsung yaitu dengan memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan, dan juga memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini. Ini disebut "*output and employment effect of inflation*".
- d. Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil (*unstable environment*) bagi keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi dimasa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang mereka menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi. Begitu pula halnya dengan bank atau lembaga peminjaman (*lenders*) lainnya, jika sekiranya menduga bahwa tingkat inflasi akan naik di masa mendatang, maka mereka akan mengenakan tingkat bunga yang tinggi atas peminjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan.

Dalam kaitan dengan dampak atau akibat inflasi ini. Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil. Menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar modal. Hal ini akan menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, yang disebabkan oleh terbatasnya penawaran dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*). Oleh karena itu, selama inflasi menuntun kearah tingkat bunga riil yang rendah dan ketidakseimbangan pasar modal, maka inflasi tersebut akan menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Nanga, 2005 h.247)

Ada beberapa cara mengatasi inflasi yang terjadi, cara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter.

1. Cara mengatasi inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter, contohnya adalah dengan politik diskonto, cara politik diskonto ini dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga bank, dengan harapan agar masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan uang yang beredar akan berkurang.
2. Cara mengatasi inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal, contoh adalah dengan pajak, dengan tarif pajak dinaikan diharapkan uang yang beredar berkurang, uang yang beredar berkurang karena jumlah pajak yang disetorkan oleh masyarakat lebih besar (banyak) daripada sebelum tarif pajak naik. Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.
3. Cara mengatasi inflasi dengan menggunakan kebijakan non moneter, contoh dari cara mengatasi inflasi dengan kebijakan ini adalah dengan meningkatkan

produksi, pemerintah membantu dan mendorong para pengusaha untuk menaikkan atau meningkat produksinya, diharapkan dengan meningkatnya produksi akan menghasilkan output yang beredar dipasaran lebih (Sukirno 2006, h. 24)

2.3. Teori Upah

2.3.1. Pengertian Upah

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah tetapi juga lembur dan tunjangan tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin (Badan Pusat Statistik 2011, h. 11).

Menurut Gilarso (2003, h. 33) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan sebagainya). Masih menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu).

Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep tingkat upah umum. Dalam kenyataannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, perlu mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah nominal dibagi oleh biaya hidup. Tingkat upah umum ini yang kemudian diadopsi menjadi tingkat upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang kebijakan (pemerintah). Standar upah buruh harus ada batasan minimumnya. Negara berkembang tidak

boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin (Maulana 2013, h. 17)

Upah riil memang berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, tetapi upah tidak selalu *fleksibel*. Kadang-kadang upah riil tertahan di tingkat kliring pasar (*market clearing level*) atau tingkat ekuilibrium. Ketika upah riil berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekakuan upah riil mengurangi tingkat perolehan kerja dan mempertinggi pengangguran. Pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penajatan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Ketika pemerintah mempertahankan agar upah tidak mencapai tingkat ekuilibrium maka dapat menimbulkan kekakuan upah. Di Indonesia, sistem upah ditetapkan berdasarkan biaya hidup pekerja di setiap daerah (Maulana 2013, h. 17)

Menurut peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi mengganti UMR menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK). Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan daerah. Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah yang harus dibayar perusahaan kepada karyawannya. Para ekonom percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar terhadap pengangguran usia muda. Upah ekuilibrium para pekerja di usia muda cenderung rendah karena mereka kurang terdidik atau kurang berpengalaman sehingga cenderung memiliki produktivitas marjinal yang rendah (Maulana 2013, h. 17)

Teori upah-efisiensi (*efficiency wage*) mengajukan salah satu penyebab dari kekakuan upah. Teori ini menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Perusahaan gagal untuk memangkas upah walaupun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, karena meskipun akan mengurangi taguhan upah perusahaan, pengurangan upah juga akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Para ekonom mengajukan empat teori upah-efisiensi untuk menjelaskan bagaimana upah mempengaruhi produktivitas pekerja, yakni;

1. Para pekerja dibayar dengan upah memadai supaya dapat mengkonsumsi lebih banyak nutrisi karena pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. teori ini tidak terlalu dianggap penting di negara-negara maju karena upah ekuilibrium mereka berada di atas tingkat yang dibutuhkan untuk dapat menjaga kesehatan dengan baik.
2. Semakin besar perusahaan membayar pekerjanya, semakin besar pula insentif mereka untuk tetap bekerja dalam perusahaan tersebut dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari perusahaan dan mengurangi waktu dan dana yang dibutuhkan untuk menarik dan melatih pekerja baru.
3. Kualitas rata-rata dari tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang mereka terima. jika perusahaan mengurangi upah, maka para pekerja terbaik bisa saja mengambil pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan para pekerja yang memiliki kualitas lebih rendah yang memiliki lebih sedikit alternatif. dengan membayar upah di atas tingkat ekulibrium,

perusahaan bisa menurunkan seleksi negatif, meningkatkan kualitas rata-rata tenaga kerjanya, dan mampu meningkatkan produktivitas.

4. Upah yang tinggi akan meningkatkan kinerja pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna kinerja para pekerja. Para pekerja dapat memilih untuk bekerja keras, atau mereka dapat memilih untuk bermalas-malasan dengan risiko tertangkap basah dan dipecat. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja apabila mereka dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka.

Inti dari keempat teori diatas yakni karena perusahaan beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah di atas tingkat ekuilibrium adalah menguntungkan. Hasil dari upah yang tinggi daripada upah ekuilibrium ini adalah tingkat perolehan kerja yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih besar (Maulana 2013, h. 19)

2.3.2. Sistem Pengupahan di Indonesia

Secara umum sistem upah menurut Gilarso (2003, h. 5-6) adalah sebagai berikut:

- a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan jika hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan

mesin, kualitas bahan yang dipakai, dan lain-lain.).

b. Upah waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per jam, perhari per minggu dan per bulan. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa, administrasinya pun dapat sederhana. Disamping itu perlu pengawasan apakah pekerja sungguh-sungguh bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain.

d. Upah premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi "normal" berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi "Premi". Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan

secara ilmiah berdasarkan *time and motion study* (waktu dan studi gerak).

e. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih dan direksi sebuah PT mendapat *tantieme*, bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

f. Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip yaitu pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja. Secara empiris besarnya tingkat upah sangat dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu:

1. Kebutuhan fisik minimum

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) merupakan kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi yang dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan.

2. Indeks harga konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup, peningkatan terhadap harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung dapat mencerminkan tingkat inflasi.

3. Pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian dalam

suatu daerah yang mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan Gilarso 2003, h. 5-6)

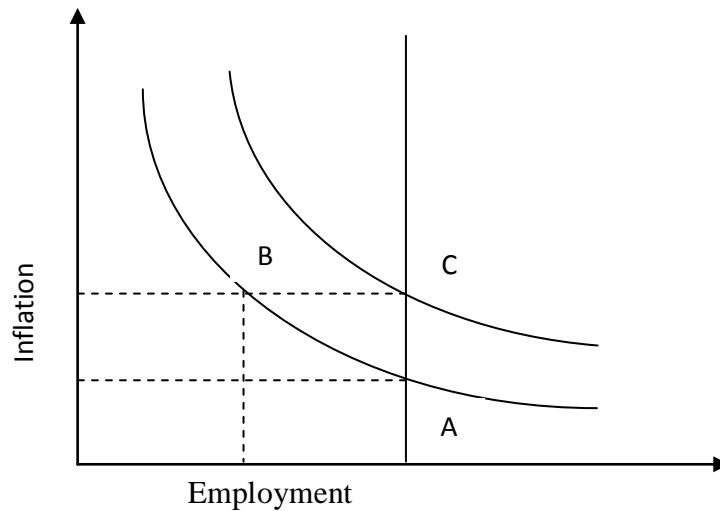
2.4. Hubungan Inflasi dan UMP dengan Pengangguran

2.4.1. Hubungan Tingkat Inflasi Terhadap Jumlah Pengangguran

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno 2008, h. 121)

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada *trade off*) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips dimana terjadi *trade off* antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (*trade off*) antara pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah.

Grafik 1
Kurva Phillips Hubungan Inflasi dengan Pengangguran



Sumber : Sukirno (2006, h. 26)

Kurva Phillips di atas menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka pengangguran berkurang (Sukirno 2006, h. 26-27).

2.4.2. Hubungan Besaran Upah Dengan Jumlah Pengangguran

Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah

tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran. Peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (*backward bending curve*) (Sisputro 2013, h. 40).

2.5. Penelitian Terdahulu

Nugroho (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011”. Dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dari empat faktor yang diteliti (PDRB, Inflasi, UMP dan AMH), terbukti bahwa UMP dan Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran

terbuka (TPT). Hal ini dapat dimengerti mengingat tingkat upah yang ditetapkan pemerintah di atas keseimbangan pasar dirasa sangat membebani perusahaan dalam biaya produksinya, dan kualitas pendidikan yang tinggi membuat masyarakat Jawa Tengah enggan bekerja pada tingkat upah yang mereka rasa kurang sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan dalam proses menempuh pendidikan.

Selanjutnya Utomo (2013) juga melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980-2010”. Model analisis yang ia gunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa variabel independent yaitu variabel upah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Indonesia selama periode 1980-2010 dan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Artinya secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia periode 1980-2010. Sebaliknya variabel tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia periode 1980-2010. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t hitung pada variabel upah (X_2) sebesar 8,872 sedangkan t tabel sebesar 2,021, sehingga variabel upah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia selama periode 1980-2010, dengan asumsi bahwa variabel yang lain konstan. Kemudian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,738 yang artinya bahwa inflasi dan UMP mampu mempengaruhi pengangguran sebesar 73,8 persen sedangkan sisanya 27,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitiannya.

2.6. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa inflasi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh nyata terhadap pengangguran di Provinsi Aceh